

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh derajat desentralisasi fiskal, rasio ketergantungan, rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan rasio efisiensi keuangan daerah terhadap kesejahteraan masyarakat pada kabupaten/kota di Jalur Pantura Provinsi Jawa Timur periode 2021-2025, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Derajat desentralisasi fiskal menjadi salah satu faktor yang berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Semakin besar kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan melalui sumber pendapatan daerah, semakin besar pula peluang pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, terutama pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2. Dana transfer dari pemerintah pusat masih memiliki peran penting dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota Jalur Pantura Provinsi Jawa Timur. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih membutuhkan dukungan fiskal dari pemerintah pusat untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.
3. Keberhasilan pemerintah daerah dalam mencapai target Pendapatan Asli Daerah belum sepenuhnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pencapaian target penerimaan daerah perlu diikuti dengan pengelolaan dan pengalokasian anggaran yang lebih produktif agar manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

4. Tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah belum menjadi faktor utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kesejahteraan masyarakat lebih dipengaruhi oleh bagaimana pemerintah daerah mengarahkan anggaran pada program-program pembangunan yang mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dibandingkan hanya berfokus pada efisiensi penggunaan anggaran.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut.

1. Pemerintah daerah kabupaten/kota di Jalur Pantura Provinsi Jawa Timur diharapkan terus memperkuat kapasitas fiskal daerah melalui optimalisasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah dengan tetap memperhatikan kualitas pelayanan publik. Peningkatan penerimaan daerah hendaknya diikuti dengan kebijakan pengalokasian anggaran yang berorientasi pada peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta sektor-sektor yang secara langsung mendukung kesejahteraan masyarakat.
2. Pemerintah daerah perlu meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan anggaran yang lebih efektif. Selain mengejar pencapaian target pendapatan dan efisiensi

penggunaan anggaran, pemerintah daerah juga perlu memastikan bahwa setiap program dan kegiatan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

3. Pemerintah pusat diharapkan tetap menjaga keberlanjutan kebijakan transfer ke daerah dengan memperhatikan kebutuhan, potensi, dan karakteristik masing-masing daerah. Selain itu, mekanisme penyaluran dana transfer perlu terus diarahkan untuk mendukung pemerataan pembangunan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah.
4. Peneliti selanjutnya disarankan untuk mengembangkan penelitian dengan menambahkan variabel lain yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat, seperti belanja pendidikan, belanja kesehatan, belanja modal, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, pertumbuhan ekonomi, investasi daerah, maupun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Selain itu, penelitian selanjutnya dapat memperpanjang periode pengamatan dan memperluas cakupan wilayah penelitian agar menghasilkan temuan yang lebih komprehensif.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan sebagai bahan pertimbangan dalam menginterpretasikan hasil penelitian, yaitu sebagai berikut.

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio efektivitas PAD dan rasio efisiensi keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Kondisi ini mengindikasikan bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak hanya ditentukan oleh keberhasilan pemerintah daerah

dalam mencapai target PAD maupun efisiensi pengelolaan keuangan, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dianalisis dalam penelitian ini.

2. Nilai koefisien determinasi (Adjusted R^2) menunjukkan bahwa masih terdapat sebagian variasi Indeks Pembangunan Manusia yang belum mampu dijelaskan oleh variabel derajat desentralisasi fiskal, rasio ketergantungan, rasio efektivitas PAD, dan rasio efisiensi keuangan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat variabel lain, seperti belanja pendidikan, belanja kesehatan, belanja modal, tingkat kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, maupun kualitas tata kelola pemerintahan yang berpotensi memengaruhi kesejahteraan masyarakat.
3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh kinerja keuangan daerah terhadap kesejahteraan masyarakat belum sepenuhnya bersifat langsung. Kondisi ini mengindikasikan adanya kemungkinan hubungan tidak langsung melalui variabel intervening atau moderasi, seperti kualitas pelayanan publik, efektivitas belanja daerah, maupun kualitas tata kelola pemerintahan, yang belum dianalisis dalam penelitian ini.
4. Temuan penelitian ini merupakan hasil empiris yang diperoleh pada karakteristik kabupaten/kota di Jalur Pantura Jawa Timur selama periode penelitian. Oleh karena itu, hubungan antarvariabel yang ditemukan belum tentu menunjukkan pola yang sama apabila diterapkan pada wilayah dengan karakteristik fiskal, sosial, dan ekonomi yang berbeda.

5.4 Implikasi Penelitian

Penelitian ini memberikan implikasi teoritis dan implikasi praktis sebagai berikut:

1. Implikasi Teoritis

Hasil penelitian ini memberikan dukungan terhadap Teori Federalisme Fiskal yang menyatakan bahwa kapasitas fiskal daerah memiliki peran dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Temuan bahwa derajat desentralisasi fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM menunjukkan bahwa semakin besar kemampuan daerah dalam menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), semakin besar pula kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan publik yang mendukung peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan standar hidup masyarakat.

Selain itu, rasio ketergantungan yang berpengaruh signifikan menunjukkan bahwa dana transfer dari pemerintah pusat masih menjadi sumber pendanaan yang penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota Jalur Pantura Jawa Timur. Hasil ini mengindikasikan bahwa pada daerah yang masih memiliki keterbatasan kapasitas fiskal, transfer pemerintah pusat tetap berperan dalam mendukung penyediaan pelayanan publik dan pembangunan manusia.

Sebaliknya, tidak signifikannya pengaruh rasio efektivitas PAD dan rasio efisiensi keuangan daerah menunjukkan bahwa keberhasilan mencapai target PAD maupun tingkat efisiensi pengelolaan keuangan belum secara langsung mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Temuan ini memperkuat pandangan

bahwa peningkatan IPM tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan memperoleh pendapatan atau menghemat pengeluaran, tetapi juga ditentukan oleh kualitas alokasi anggaran, ketepatan sasaran program, serta efektivitas belanja pemerintah pada sektor-sektor yang berkontribusi terhadap pembangunan manusia.

2. Implikasi Praktis

Hasil penelitian ini memberikan beberapa implikasi bagi pemerintah daerah di Jalur Pantura Jawa Timur.

Pertama, pemerintah daerah perlu terus meningkatkan kapasitas fiskal melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah tanpa membebani masyarakat secara berlebihan. Peningkatan PAD sebaiknya dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan daerah, digitalisasi sistem pemungutan pajak dan retribusi, serta pengelolaan aset daerah yang lebih produktif sehingga kemampuan pembiayaan pembangunan semakin meningkat.

Kedua, pemerintah daerah perlu mengelola dana transfer dari pemerintah pusat secara lebih optimal dan berorientasi pada hasil pembangunan. Dana transfer hendaknya diprioritaskan untuk membiayai sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, serta program pengentasan kemiskinan sehingga mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia.

Ketiga, meskipun rasio efektivitas PAD tidak berpengaruh signifikan, pemerintah daerah tetap perlu meningkatkan kualitas perencanaan target PAD agar lebih realistis dan berbasis potensi riil daerah. Keberhasilan mencapai target pendapatan perlu diikuti dengan kebijakan pengalokasian anggaran yang tepat

sehingga peningkatan pendapatan dapat diterjemahkan menjadi peningkatan kualitas pelayanan publik.

Keempat, pemerintah daerah tidak hanya berfokus pada efisiensi anggaran dalam arti penghematan biaya, tetapi juga pada efisiensi yang menghasilkan manfaat bagi masyarakat. Penghematan anggaran sebaiknya tidak mengurangi kualitas pelayanan publik, melainkan diarahkan untuk meningkatkan produktivitas belanja daerah sehingga setiap anggaran yang dikeluarkan mampu memberikan nilai tambah bagi pembangunan manusia.

Bagi akademisi, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dalam pengembangan penelitian mengenai hubungan antara kinerja keuangan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel lain, seperti belanja pendidikan, belanja kesehatan, belanja modal, tingkat kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, atau kualitas tata kelola pemerintahan agar mampu menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi Indeks Pembangunan Manusia secara lebih komprehensif.